

terhadap mahasiswa. Mereka menjalankan tugasnya hanya untuk kepentingan individual dan kelompok. Bahkan mahasiswa hampir tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Untuk berkomunikasi antara mereka dengan mahasiswa hampir tidak pernah. Mereka seharusnya tanggap dan respek terhadap kondisi mahasiswa. Jika di lihat masih banyak program kerja atau kegiatan yang belum bisa merangkul atau melibatkan sebagian besar mahasiswa UIN Sunan Ampel. Hal ini dikarenakan mereka yang berada di posisi wakil mahasiswa ditumpangi oleh partai politik mahasiswa. Dalam kampus UIN Sunan Ampel sebenarnya terdapat banyak partai-partai mahasiswa antara lain Partai Revolusi Mahasiswa (PRM), Partai Republik Mahasiswa (PAREM), Partai Matahari Terbit (PMT), Partai Progresif Mahasiswa (PPM), Partai Demokrasi Mahasiswa (PDM) dan masih banyak lagi partai yang di UINSA. Di dalam partai mahasiswa tersebut ditumpangi oleh organisas ekstra kampus mahasiswa yaitu organisasi PMII, HMI, GMNI dan lainnya. Oleh karena itu posisi-posisi tersebut banyak diperebutkan. Karena inti dari tujuan mereka adalah bagaimana merebut sebuah kekuasaan. Hal ini yang mengakibatkan moment pemilu selalu menjadi bahan rebutan bagi partai politik untuk meraih kekuasaan di kampus.

Di setiap tahun Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (PEMIRA) Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U) akan selalu terjadi, baik secara sadar maupun tanpa sadar. Tidak dapat dihindari mengenai kesiapan dengan apa yang akan terjadi nantinya. Alasan berpolitik selalu menjadi berita segar para aktivis yang pastinya sudah mempersiapkan calon kandidat untuk maju

dalam pemilihan. Tetapi seiring berjalanya hal tersebut, masih banyak yang menjadi bahan pertanyaan dipikiran selain berpikir tentang kekuasaan. Jika berbicara tentang kekuasaan maka segala cara akan dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Inilah yang menyebabkan pemilu di kampus ini berjalan tidak sehat.

Pada umumnya Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (PEMIRA) yang ada di UIN Sunan Ampel juga mempunyai regulasi undang-undang yang mengatur jalannya sebuah Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (PEMIRA) dan syarat-syarat pendaftaran calon Partai Politik Mahasiswa (PPM). Kedua undang-undang tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. karena Undang-undang tersebut merupakan pedoman pelaksanaan Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (PEMIRA) di UIN Sunan Ampel. Sebelum adanya perumusan dan disepakatinya kedua undang-undang tersebut terdapat kongres atau musyawarah yang bernama Kongres Keluarga Besar Mahasiswa Universitas yang disingkat KBMU yang diikuti oleh masing-masing dua perwakilan mahasiswa dari semua organisasi intra kampus yang diadakan setiap tahun sekali. Secara global kongres ini bertujuan menetapkan sistem dan undang-undang keorganisasian mahasiswa. Sistem inilah yang nantinya juga menjadi pegangan dan rujukan bagi organisasi intra kampus seperti pengurus MUSEMA, DEMA, SEMA, HMP (Himpunan Mahasiswa Prodi), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan lainnya dalam menjalankan roda organisasinya, begitu juga Komisi Pemilihan Umum

Raya Mahasiswa (KOPURWA) dan anggotanya dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Dalam perumusan undang-undang pada saat Kongres Besar Mahasiswa Universitas (KBMU) terdapat beberapa aturan terkait partai politik mahasiswa, antara lain: mengatur syarat terbentuknya partai, tugas, hak, kewajiban, keuangan, pengawasan dan sanksi. Dan dalam undang-undang tentang pemilihan umum juga mempunyai aturan-aturan sendiri, antara lain mengatur tugas dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (KOPURWA), tempat pemilihan (TPS) dan jumlah kursi, pelaksanaan dan keorganisasian, pemantauan dan pengawasan pemilu, serta hak pilih dan pencalonan. Dalam Kongres Besar Mahasiswa (KBMU) tersebut yang mengatur sistem pemilu dan partai politik dengan berlandaskan asas demokrasi.

Namun dalam praktiknya pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (PEMIRA) Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Ampel Surabaya 2016, untuk memenangkan sebuah kepemimpinan Dewan Eksekutif Mahasiswa tahun 2016, mulai dari Kongres Besar Mahasiswa (KBMU), pembentukan Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (KOPURWA), persyaratan-persyaratan untuk mencalonkan hingga kebijakan-kebijakan yang di buat hanya menguntungkan satu calon saja. Dalam proses pemilihan tersebut terdapat politik kekuasaan yang ada dalam penyelenggaraannya antara lain dominasi sistem. Karena kebanyakan yang duduk di kursi kepemimpinan organisasi intra kampus maupun yang

tidak menjabat di organisasi intra adalah dari organisasi ekstra seperti PMII, HMI, GMNI dan organisasi lain. apalagi jika diukur dengan proses pelaksanaannya pada saat pemilihan. Jadi tolak ukur untuk memenangkan kepemimpinan organisasi intra kampus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Ampel adalah siapa yang mendominasi di struktur organisasi intra tersebut maka mereka yang memiliki peluang besar untuk memenangkannya.

Hal ini dalam praktek sistem Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (PEMIRA) Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Ampel Surabaya 2016, masih banyak terdapat kritikan dari beberapa pihak terhadap penyelenggaraan pemilu, baik itu dari kubu partai, mahasiswa dan lain sebagainya. Tidak hanya itu penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (PEMIRA) tersebut juga menimbulkan konflik antar partai, mahasiswa dan Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (KOPURWA), bahkan banyak kritikan yang datang dari media masa kampus terhadap proses penyelenggaraan pemilu.

Jadi, Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (PEMIRA) secara sehat yang di gamborkan masih minim dengan realitas yang ada. Sejauh ini pemilih yang tidak membawa bendera dibelakangnya atau yang biasa disebut dengan mahasiswa abu-abu selalu menjadi sasaran empuk perebutan massa. Desas-desus muncul dari berbagai kubu. Saling tuding satu sama lain menimbulkan banyak permasalahan di berbagai pihak. Bahkan terlalu banyak provokasi dari pihak partai kepada pihak abu-abu. Selain itu, persyaratan yang dibuat

oleh KOPURWA memaksa para kandidat dan tim suksesnya untuk menyusun beberapa strategi sebagai cara untuk memenangkan pemilu, hal ini dikarenakan jarak waktu sosialisasi dan pencoblosan sangat singkat, dan ini menjadi problema tersendiri, bagi mahasiswa selaku pemilih. Golput pun tidak jarang menjadi pilihan mahasiswa. Karena rasa apatis, dan tidak tahu apa dan siapa yang harus dipilih. Secara sosiologis dalam tindakan seseorang atau kelompok dalam perebutan kekuasaan yang dilakukan para aktor (organisasi ekstra) yang mendominasi di kampus tersebut bisa saja mempengaruhi tingkat partisipan dan pembelajaran mahasiswa agar bersimpati pada calon tertentu atau tidak. karena ilmu politik tidak lepas hubungannya dengan masyarakat.

Maka melihat fenomena di atas, menarik untuk diteliti **POLITIK KEKUASAAN KAMPUS DALAM TINJAUAN PERILAKU SOSIAL** (*Studi Tentang Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya 2016 Perspektif Pilihan Rasional James S. Coleman*) untuk melihat lebih jauh bagaimana proses pertarungan kekuasaan politik kampus dalam ajang pemilihan Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Apakah proses pemilu raya DEMA UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2016 sudah mencerminkan pemilu yang demokratis sesuai dengan pemilu pada umumnya dengan perspektif sosiologis.

7. Politik Kekuasaan Kampus Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Ampel

Lingkungan kampus merupakan simulasi dari kehidupan masyarakat. Segala apa yang terjadi di dalam masyarakat juga terjadi di lingkungan kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, termasuk budaya berpolitik. Kampus UIN Sunan Ampel merupakan miniatur negara, seperti pemerintahan demokrasi yang sebenarnya. Di dalam kampus UIN Sunan Ampel dalam lembaga mahasiswa juga ada yang namanya lembaga eksekutif dan legislatif. Atau biasa disebut DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa) dan SEMA (Senat Mahasiswa). Dalam lembaga tersebut tidak lepas yang namanya aroma politik. Budaya politik justru mendapat tempat tersendiri di kampus ini. Bahkan organisasi-organisasi ekstra mahasiswa seperti, PMII, HMI, GMNI, dan lainnya yang mempunyai kepentingan peran dan tujuan dalam dunia perpolitikan di kampus. yaitu untuk menguasai pengkaderan yang ada di lingkungan kampus khususnya mahasiswa. Maka dari itu, organisasi ekstra mahasiswa berbondong-bondong merebutkan jajaran kursi tertinggi lembaga eksekutif dan legislatif mahasiswa tersebut.

